

Reception Analysis Masyarakat Surabaya terhadap Wacana Presiden 3 Periode Dalam Indonesia Lawyers Club Episode “Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi”

Rizal Wahyu Saputra¹, Dyva Claretta²

^{1,2}UPN “Veteran” Jawa Timur

rijaaalll@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the 3-period presidential discourse in the Indonesia Lawyers Club (ILC) program. This study aims to determine public acceptance of the 3-term presidential discourse on the YouTube channel Indonesia Lawyers Club (ILC) episode “Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi”. The research method uses a qualitative reception analysis approach with the encoding-decoding model by Stuart Hall to understand community reception. Stuart Hall divides the categories of audience acceptance into 3 positions, namely dominant, negotiated, and oppositional. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews. The results of the study show that the public does not agree with the existence of a 3-term president, because this is contrary to the constitution and the basis of the 1945 Constitution that applies in Indonesia. Even though all informants acknowledged Pak Jokowi's performance, according to the informants, Pak Jokowi was not fit to continue his term of office because doing so could undermine reforms and damage the state order.

Keywords: Reception analysis, 3 period presidential discourse, Indonesia Lawyers Club

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi tentang wacana presiden 3 periode dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan masyarakat tentang wacana presiden 3 periode dalam channel YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC) episode “Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi”. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif analisis resepsi dengan model encoding-decoding oleh Stuart Hall untuk memahami resepsi masyarakat. Stuart Hall membagi kategori penerimaan khalayak dalam 3 posisi yaitu dominant, negotiated, dan oppositional. Teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak menyetujui adanya presiden 3 periode, karena hal tersebut telah bertentangan dengan konstitusi dan dasar negara UUD 1945 yang berlaku di Indonesia. Meskipun semua informan mengakui kinerja Pak Jokowi, namun tetap saja menurut para informan, Pak Jokowi tidak layak untuk meneruskan masa jabatannya sebab hal itu dapat mencederai reformasi dan merusak tatanan negara.

Kata Kunci: Analisis resepsi, wacana presiden 3 periode, Indonesia Lawyers Club

PENDAHULUAN

Indonesia Lawyers Club atau lebih dikenal dengan ILC merupakan sebuah program acara yang sangat dikenali masyarakat. Acara ini berbentuk *talkshow* dan juga diskusi publik yang membahas tentang politik, ekonomi, hukum, dan kriminalitas di Indonesia. Awalnya ILC adalah program salah satu TV swasta di Indonesia yang kemudian beralih ke media YouTube. Dipimpin oleh seorang jurnalis

senior, Karni Ilyas, ILC turut mengundang narasumber-narasumber ternama yang ahli pada bidangnya.

Pada bulan Maret 2022, ILC mengunggah sebuah konten yang berjudul "Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi". Dalam unggahan video tersebut dihadiri beberapa narasumber seperti Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia), Rocky Gerung (Pengamat Politik), Aria Bima (Politisi PDIP), Lukman Edy (Politisi PKB), Immanuel Ebenezer (Ketua Jokowi Mania), Haris Azhar (Pendiri Lokataru), dan Rizal Ramli (Ekonom Senior). Konten ini membahas sebuah hasil survey yang telah dilakukan oleh Lembaga Survey Indikator, dimana pada survey tersebut menunjukkan bahwa sebesar 70% masyarakat Indonesia puas terhadap Jokowi. Hal ini membuat bingung dan heran bagi para narasumber lain serta masyarakat, masalahnya bagaimana bisa disaat harga-harga kebutuhan naik, tapi publik merasa puas terhadap Jokowi.

Sehubungan adanya hasil tersebut, muncul wacana yang membuat ramai di kalangan masyarakat yakni wacana presiden 3 periode. Menurut pengamat politik, Wempi Hadir menilai ada 2 kemungkinan yang menyebabkan adanya wacana presiden 3 periode, yaitu adanya komunitas Jokowi-Prabowo (JokPro) di Jakarta dan Komite Referendum masa jabatan presiden di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada saat yang bersamaan Ketua Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) Lucius Karus menilai wacana masa jabatan presiden 3 periode didorong oleh ketakutan lingkaran penguasa akan kehilangan kekuasaannya usai presiden saat ini lengser alias *post power syndrome*. (voi.id, 2022)

Ditambah juga munculnya wacana baru yang membuat presiden 3 periode ini semakin panas diperdebatkan oleh masyarakat, yakni penundaan pemilu 2024. Wacana ini berawal dari Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia dengan alasan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Kemudian disusul oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan Presiden Jokowi tentu akan setuju dengan penundaan pemilu jika semua partai kompak, dia menilai pemerintah menunggu keputusan dari partai. Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, semakin memanasakan wacana penundaan Pemilu 2024. Dia mengklaim punya *big data* yang menyebut ada 110 juta warga yang ingin pemilu ditunda untuk menjaga kondisi sosial politik dan ekonomi. Berikut tanggapan informan mengenai survey kepuasan publik yang berhubungan dengan penundaan pemilu (suara.com, 2022).

Sebagai audiens sekaligus pengguna dari YouTube, masyarakat berperan sebagai khalayak media yang aktif dan memiliki kuasa penuh terhadap apa yang mereka tonton dalam hal penggunaan, menerima pesan, sekaligus memproduksi makna. YouTube sebagai bentuk media baru, yang muncul akibat dari perkembangan teknologi komunikasi, memberikan kebebasan bagi para penggunanya untuk dapat memilih konten apa yang hendak mereka konsumsi, berinteraksi dan menanggapi, serta dapat menyesuaikan waktu yang dikehendaki penggunanya untuk mengirim maupun menerima pesan.

Oleh karena itu, setiap individu tentunya akan memiliki keunikannya masing-masing dalam menggunakan YouTube. Mulai dari bagaimana mereka menemukan dan tertarik pada konten tertentu, membentuk kebiasaan dalam mengonsumsi media, terlibat aktif dalam mencari informasi dan menanggapi, hingga membentuk persepsi dan pemaknaan yang unik dari masing-masing individu ketika mengonsumsi suatu konten.

Dari apa yang penulis uraikan diatas, penulis mencoba melihat bagaimana penerimaan masyarakat Surabaya pada wacana presiden 3 periode dalam *channel YouTube Indonesia Lawyers Club* yang berjudul "Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi", Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *reception analysis* atau analisis resepsi Stuart Hall. Analisis resepsi merupakan pemaknaan isi pesan dari suatu media oleh khalayak, dalam buku Pengantar Teori Komunikasi (West & Turner, 2012) Stuart Hall menjelaskan *reception analysis* lebih menitikberatkan pada peran media dan kemampuannya membentuk opini publik. Analisis resepsi juga berarti teks pada media memiliki makna pada penerimaan dan audiens juga aktif memproduksi makna dari media menerima dan menginterpretasikan teks-teks tersebut sesuai dengan latar belakang budaya dan sosial yang dimiliki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis resepsi. Menurut Muslimin metode kualitatif adalah jenis penelitian yang menekankan pada konstruksi narasi atau deskripsi tekstual dari fenomena yang diteliti (Muslimin, 2016). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan jenis penelitian studi analisis audiens atau analisis khalayak. Audiens merupakan individu dengan berbagai macam latar belakang, selain itu resepsi audiens juga meyakini bahwa audiens berperan aktif dalam memaknai sebuah pesan (Cangara, 2010).

Penulis menggunakan teori analisis resepsi Stuart Hall (Hall, 1973), *encoding – decoding*. Proses pengemasan informasi dalam sebuah media komunikasi disebut *encoding*, setelah pesan sampai di penerima, terjadi proses *decoding*, yaitu pesan diinterpretasikan, setelah itu ada umpan balik ke penerima informasi. Menurut Hall terdapat 3 posisi antara lain, pertama *dominated reading*, yaitu khalayak menerima sepenuhnya pesan yang dikonstruksi oleh media. Kedua *negotiated reading*, yaitu khalayak menerima ideologi dominan namun dalam level tertentu khalayak juga menolak apa yang dikonstruksi media disesuaikan dengan aturan budaya yang berlaku. Ketiga *oppositional reading*, yaitu khalayak mengakui pesan dari media akan tetapi menolak apa yang dikonstruksikan media dan melakukan pemaknaan dengan cara berpikir oleh mereka sendiri (Storey, 2006: 14-16).

Penulis menggunakan wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi secara lisan dengan cara bertanya langsung kepada beberapa informan yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Bungin, 2012: 67).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia Lawyers Club merupakan tayangan diskusi publik yang dihadiri oleh beberapa narasumber ternama yang ahli dan kompeten dalam bidangnya. Pada mulanya program ini disiarkan di televisi konvensional oleh tvOne namun seiring waktu berjalan dan sedikit minat masyarakat menonton televisi, akhirnya tvOne memutuskan untuk putus kontrak dengan ILC. Melihat konvergensi media yang terjadi, tak lama kemudian ILC berinisiatif untuk membuat channel YouTube sebagaimana platform yang banyak diminati oleh masyarakat. Dalam *channel* nya, Indonesia Lawyers Club rajin mengunggah setidaknya 1-2 konten per minggunya. Dalam program acara Indonesia Lawyers Club tidak hanya berisi tentang diskusi publik, disamping diskusi tersebut pasti terjadi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak (pro dan kontra) yang mengakibatkan dialektika dan debat diantara para narasumber.

Beberapa bulan lalu terbitlah suatu survey yang menggegerkan di kalangan masyarakat. Survey ini bertemakan kepuasan publik terhadap Jokowi yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indikator. Dengan dirilisnya hasil survey ini ke publik, membuat ILC tertarik untuk mengangkat tema ini. Dalam unggahannya yang berjudul "Harga-Harga Naik, Tapi Publik Terhadap Jokowi" Bung Karni mengajak para narasumber untuk membahas hasil survey tersebut. Adanya hasil survey tersebut bisa menjadikan alasan kuat untuk Pak Presiden meneruskan masa jabatannya.



Gambar 1 Konten Indonesia Lawyers Club: Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi

Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan informan dalam tiga kategori berdasarkan teori Stuart Hall yaitu *dominan-hegemonic*, *negotiated*, dan *oppositional*. Pengelompokkan karakteristik tersebut berdasarkan atas penerimaan informan tentang hasil survey kinerja Jokowi dan wacana presiden 3 periode dalam *channel YouTube* Indonesia Lawyers Club episode "Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi". Adapun informan dalam penelitian ini yakni Pak Adhitya (informan I) sebagai Ketua RT, Aldika (informan II) mahasiswa ilmu hukum, Erfan

(informan III) mahasiswa ilmu hukum, Calvin (informan IV) mahasiswa FISIP, dan Pak Waluyo (informan V) dosen hukum.

Berdasarkan apa yang peneliti analisis terkait hasil survey kepuasan publik terhadap Jokowi, semua informan menyatakan tidak mempercayai hasil survey yang telah dilakukan oleh Indikator. Mereka mempermasalahkan sumber data, teori, metode, dan informan yang digunakan dalam survey tersebut. Menurut pengakuan informan III dan IV jika dirinya disurvei tentang pemerintahan, masyarakat lebih memilih untuk cari aman. Mungkin kalau ditanya satu persatu sesuai dengan hati nurani mereka, masyarakat pasti banyak yang menyatakan tidak puas. Informan II juga berpendapat jika melihat dari sosial media, masih banyak ditemukan kritikan-kritikan yang ditujukan kepada pemerintah. Dengan adanya hal ini, maka bisa diartikan kelima informan berada pada posisi *oppositional*.

Masyarakat Puas Karena Faktor Ekonomi Setelah Menurunnya Korban Covid-19

Dalam konten tersebut, Burhanuddin Muhtadi, selaku direktur utama Lembaga Survey Indikator mengkalim bahwa pihaknya telah melakukan survey dengan metode yang sudah dijelaskan pada rilisannya. Burhanuddin mengklaim kepuasan publik semakin meningkat setelah menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia, karena menurut beliau perekonomian pada saat itu mulai stabil dan membaik jika dibandingkan dari sebelumnya. Dengan adanya pernyataan ini, peneliti menanyakan kepada informan terkait tanggapan mereka tentang kepuasan publik meningkat setelah menurunnya korban Covid-19.

Informan I, II, III, IV, dan V kurang sepakat dan kurang setuju jika banyak masyarakat yang puas berasal dari faktor ekonomi karena menurunnya korban Covid-19, justru di Indonesia setelah Covid-19 ini harga-harga mengalami kenaikan. Informan I menyatakan ini paradoks sebenarnya karena pada saat itu negara mengalami resesi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi minus, akan tetapi kenapa masyarakat merasa puas. Maka peneliti dapat menyimpulkan semua informan ini berada di posisi *oppositional* dalam menanggapi kepuasan publik yang dihasilkan dari faktor ekonomi

Hasil Survey Berdasarkan Ketakutan Individu

Haris Azhar membandingkan survey kepuasan publik ini dengan survey ketakutan masyarakat untuk berkekspresi. Menurut Haris dari pengalamannya yang membandingkan kedua survey tersebut beliau menyampaikan “... saya punya hak untuk membaca dan menafsirkan, jangan-jangan yang menjawab 70% ini puas karena sudah mengalami ketakutan...” kemudian peneliti menanyakan tanggapan informan terkait hasil survey 70% publik yang puas adalah hasil yang berdasarkan ketakutan individu.

Dalam menanggapi hal ini, Informan I dan V tidak sepakat jika hasil survei tersebut berdasarkan ketakutan individu. Mereka berpendapat bisa saja hal ini adalah yang alasan yang dibuat oleh pihak oposisi untuk menjatuhkan lembaga, bahkan

sampai saat ini negara tidak ada aturan bagi orang yang mengkritik pemerintah serta saat survey ini diadakan seharusnya informan tidak dalam keadaan terpaksa. Maka dari apa yang informan ungkapkan, peneliti melihat kedua informan tersebut berada pada katagori *oppositonal position*.

Sedangkan Informan II, III, dan IV setuju terhadap hasil survey ini berdasarkan ketakutan individu. Mereka berpendapat mungkin masyarakat takut dikenakan UU ITE dan ditangkap paksa, selain itu jika ditanya oleh lembaga survey yang belum dikenali mereka cenderung lebih cari aman untuk keselamatan diri. Dari apa yang dijelaskan, peneliti melihat ketiga informan ini berada pada posisi *dominant-hegemonic*.

Penerimaan Masyarakat Terhadap Diadakannya Survey dalam hal Politik dan Pemerintahan

Setelah menyikapi adanya survey kepuasan yang dilakukan Lembaga Indikator, kemudian peneliti juga menanyakan pendapat para informan apakah sebenarnya survey ini merupakan langkah yang tepat digunakan dalam hal politik ataupun pemerintahan, melihat setelah terbitnya survey yang dilakukan Indikator menimbulkan beragam kontroversi dan kritik dari masyarakat.

Dari apa yang disampaikan oleh informan III yang tidak setuju jika survey ini diadakan, menurutnya negara Indonesia berlandaskan demokrasi dan tidak bisa menentukan kebijakan hanya dari melihat survey. Peneliti melihat Informan III termasuk kedalam kategori *oppositional position*.

Sedangkan Informan I, II, IV, dan V mereka sepakat jika survey ini diadakan untuk hal politik dan pemerintahan. Menurut mereka seorang pemimpin ataupun pemerintahan membutuhkan data dan fakta untuk mengetahui persepsi, kondisi, aspirasi, dan kritik dari masyarakat sehingga dapat dijadikan evaluasi dan saran bagi pemangku kebijakan. Dalam hal ini peneliti melihat informan I, II, IV, dan V berada pada katagori *dominant-hegemonic position*.

Penerimaan Masyarakat Surabaya Adanya Wacana Presiden 3 Periode

Semua informan mengakui sikap konsistensi yang dimiliki oleh Pak Jokowi yakni dalam pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Untuk kinerja Pak Jokowi sendiri, semua informan menyatakan ada nilai plus dan minus. Nilai plus tersebut mulai dari pembangunan infrastruktur, birokrasi, dan ekonomi. Sedangkan nilai minusnya setiap infroman memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang informan mempengaruhi terhadap penerimaan wacana presiden 3 periode pada *channel YouTube* Indonesia Lawyers Club episode "Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi".

Informan I sekaligus juga sebagai tenaga pendidikan menyatakan dari sisi SDM yang tidak pernah mengalami kenaikan gaji sejak tahun 2019. Informan II menilai anggota kementerian dari kabinet Pak Jokowi memiliki kinerja yang buruk, serta menilai saat ini krisis demokrasi dimana pemerintah seolah-olah membatasi masyarakat. Menurut Informan III meskipun kinerja Pak Jokowi cukup baik, tapi

masih belum bisa memberikan perubahan yang signifikan bagi Indonesia. Informan IV berpendapat terkait pengusutan HAM yang telah dijanjikan Pak Jokowi namun sampai saat ini masih belum terealisasi. Sedangkan Informan V menyatakan Pak Jokowi terlalu fokus pada pembangunan, sedangkan masih banyak masalah yang perlu dilihat seperti pendidikan kurang merata, kemiskinan, dan banyaknya pengangguran.

Dari apa yang peneliti lihat dalam menanggapi wacana presiden 3 periode, kelima informan tidak setuju dengan adanya wacana presiden 3 periode. Mereka menyatakan hal ini tentu berlawanan dengan konstitusi dan sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari apa yang peneliti lihat mengenai wacana presiden 3 periode ini, kelima informan berada pada posisi *oppositional*.

Penerimaan Masyarakat Surabaya Tentang Penundaan Pemilu 2024

Setelah rilisnya survey kepuasan publik terhadap Jokowi, muncul wacana baru yakni penundaan pemilu 2024 yang berawal dari Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia dengan alasan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, semakin memanasakan wacana penundaan Pemilu 2024. Dia mengklaim punya *big data* yang menyebut ada 110 juta warga yang ingin pemilu ditunda untuk menjaga kondisi sosial politik dan ekonomi.

Seperti yang diutarakan Informan I bisa saja penundaan itu terlaksana karena alasan menurunnya ekonomi dan pandemi, dan mungkin ini adalah rencana para pejabat untuk kepentingan kelompoknya. Namun tetap saja informan I tidak menyetujui dengan wacana ini, menurutnya tidak ada politik yang jujur dan terbuka, serta para pejabat sudah merencanakan ini semua. Informan II dan III menganggap wacana ini ada hubungannya dengan 3 periode dan mereka menganggap ini menyalahi dasar negara. Selanjutnya informan IV menganggap penundaan ini sangat berbahaya dan wacana ini muncul karena orang-orang kabinet ingin mempertahankan jabatannya. Terakhir Informan V berpendapat bahwa penundaan pemilu ini sebatas statement dari kelompok tertentu selain itu juga tidak ada hal yang mendesak untuk presiden meneruskan masa jabatannya. Kemudian peneliti menyimpulkan bahwa semua informan berada posisi *oppositional* dalam menanggapi wacana penundaan pemilu.

Kelayakan Pak Jokowi untuk Meneruskan Masa Jabatannya

Kemudian dalam hal kelayakan Pak Jokowi untuk meneruskan masa jabatannya, kelima informan juga menyatakan tidak layak meskipun kinerja Pak Jokowi bagus. Jika saja wacana presiden 3 periode terjadi, hal tersebut bisa merusak tatanan negara yang juga berpengaruh dengan keberlangsungan pemerintahan. Indonesia butuh orang baru yang lebih visioner agar dapat memberikan perubahan dan peningkatan yang signifikan serta warna baru bagi demokrasi negara ini. Dengan adanya pandangan ini, dapat diartikan kelima informan tersebut berada pada kategori *oppositional position*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan diatas mengenai penerimaan masyarakat Surabaya tentang wacana presiden 3 periode dalam Indonesia Lawyers Club episode "Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi" terdapat beragam intrepertasi dari para informan. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Dalam poin kepuasan publik menurut faktor ekonomi setelah korban Covid-19 menurun, kelima informan berada pada *oppositional position*, tidak setuju karena justru setelah korban Covid-19 menurun harga-harga di Indonesia mengalami kenaikan. Kemudian dalam poin hasil survey berdasarkan ketakutan individu, informan I dan V berada di posisi *oppositional* karena bisa saja ini adalah alasan yang dibuat-buat oleh pihak oposisi. Sedangkan Informan II, III, dan IV berada di posisi *dominant-hegemonic* sebab adanya kasus UU ITE dan ditangkap paksa. Dalam poin adanya survey dalam politik dan pemerintahan, informan I, II, IV, dan V berada pada kategori *dominant-hegemonic position*, menurut mereka data diperlukan untuk mengetahui persepsi dari masyarakat. Sedangkan informan III berada dalam kategori *oppositional position* menurutnya Indonesia tidak bisa menentukan kebijakan hanya dari melihat survey.

Kemudian terkait wacana presiden 3 periode, kelima informan menyatakan tidak setuju karena hal tersebut telah mencederai tatanan konstitusi dan UUD 1945 sebagai dasar hukum di Indonesia. Meskipun konstitusi dan kinerja Pak Presiden bagus, tetap saja Pak Jokowi tidak layak untuk meneruskan masa jabatannya karena tidak ada sesuatu hal yang mendesak dan Indonesia membutuhkan warna-warna baru untuk melanjutkan keberlangsungan negara ini. Adanya wacana penundaan pemilu juga membuat semua informan tidak setuju dan menganggapnya penundaan ini hanyalah statement dari suatu kelompok saja. Dari hal tersebut, diketahui maka kelima informan berada pada posisi *oppositional*.

Saran

Peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat memberikan keragaman data terutama mengungkap analisis dari sudut pandang kelompok lain, tidak hanya dari masyarakat, mungkin bisa dari pejabat tinggi. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan literasi-literasi lain yang lebih kontemporer, utamanya yang mengkaji seputar khalayak media digital. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengungkapkan berbagai fenomena lain dari tayangan konten channel Indonesia Lawyers Club terhadap episode-episode terbaru kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2012). *Analisis Data penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Cangara, H. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hall, S. (1973). *Encoding and Decoding in the television discourse*. University of Birmingham.

- Inriyanti, E., Fitriana P, A., & Nayiroh, L. (2022). Analisis Resepsi Khalayak Terhadap Isi Pesan Pada Iklan Somethinc X Lifnie Sanders. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2), 822–827. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/4330>
- Milatihofa, Kusrin, dan W. A. A. (2021). Analisis Resepsi Khalayak Terhadap Makna Body Positivity Pada Instagram Tara Basro. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 174–185.
- Muslimin, M. (2016). *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Selaras.
- Storey, J. (2006). *Cultural Theory and Popular Culture*. Pearson Prentice Hall.
- Verdiana, D. M. (2021). Analisis Resepsi Terhadap Kreativitas Kekeyi Putri Cantika Di Youtube. *Lakon: Jurnal Kajian Sastra Dan Budaya*, 10(1), 11. <https://doi.org/10.20473/lakon.v10i1.29770>
- West, R., & Turner, L. H. (2012). *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi. Terjemahan dari Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. Salemba Humanika.
- <https://voi.id/berita/61527/wacana-3-periode-presiden-dari-mana-asalnya>
- <https://www.suara.com/news/2022/04/07/154933/asal-mula-wacana-penundaan-pemilu-2024-dari-bisikan-menteri-didukung-apdesi-disetop-jokowi?page=2>